

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Transportasi kota besar dewasa ini berkembang fenomenal dengan pertumbuhan jumlah kendaraan melebihi pertumbuhan jumlah dan kualitas jalan. Pertumbuhan ekonomi yang menaikkan kesejahteraan kelompok penduduk tertentu dalam pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, yang menaikkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga berdampak negatif (inefisiensi atau kenaikan biaya sosial) karena kemacetan yang terjadi.

(sumber : [http://eprints.binus.ac.id/13853/1/0202-1111%2032\\_28%20-%20AK%20-%20Hanggoro%20Pamungkas\\_setting-ABSTRACT.pdf](http://eprints.binus.ac.id/13853/1/0202-1111%2032_28%20-%20AK%20-%20Hanggoro%20Pamungkas_setting-ABSTRACT.pdf))

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

(sumber : <http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/jurnal-akuntansi/artikel/739/analisis-pengenaan-tarif-pajak-progresif-pada-pajak-kendaraan-bermotor-berdasarkan-the-four-maxims>)

Pajak Progresif awalnya dikenakan dengan maksud untuk mengendalikan laju lalu lintas yang semakin padat, terutama pada kota-kota besar yang semakin hari semakin padat dan macet. Cara perhitungannya diatur oleh perda nomor 8 tahun 2010 dan berlaku mulai 1 Januari 2011.

(sumber : <http://jasastnkbpbk.blogspot.com/2012/01/cara-perhitungan-pajak-kendaraan.html>)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Bandung dengan judul **“PENGARUH DIBERLAKUKANNYA PAJAK PROGRESIF DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Bandung secara parsial dan simultan?

3. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat bila dibandingkan dengan penerimaan bea balik nama sehubungan dengan penerapan tarif progresif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Bandung secara parsial dan simultan.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor roda empat bila dibandingkan dengan penerimaan bea balik nama sehubungan dengan penerapan tarif progresif.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pihak-pihak atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pembaca/ peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca/ peneliti lain mengenai pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap

penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Bandung.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor roda empat di Bandung.